



CD Book

EDISI 11 | BUKU 1

PERPAJAKAN INDONESIA



WALUYO



Penerbit
Salemba Empat

Daftar Isi

Kata Sambutan: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia v

Kata Sambutan: Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia—PPAk. FEUI vii

Kata Pengantar ix

BAGIAN I—PERPAJAKAN UMUM

Bab 1 Pengantar Perpajakan 1

Pendahuluan 1

Pengertian Pajak 2

Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek 3

Aspek Ekonomi 3

Aspek Hukum 4

Aspek Keuangan 5

Aspek Sosiologi 6

Fungsi Pajak 6

Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya 6

Retribusi 6

Sumbangan 7

Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak 7

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata 8

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana 9

Penafsiran dalam Hukum Pajak 9

Hukum Pajak Formal dan Hukum Pajak Materiil 11

Pembagian Pajak menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya 12

Perlawaan terhadap Pajak 12

Perlawaan Pasif 12

Perlawaan Aktif 13

Asas-Asas Pemungutan Pajak 13

Cara Pemungutan Pajak 16

Tarif Pajak 17

Hapusnya Utang Pajak 19

BAGIAN II—KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Bab 2 Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan 21

Pendahuluan 21

Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum 23

Tahun Pajak 24

Penetapan Tahun Pajak 24

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 24

Pengertian dan Fungsi NPWP 24

Cara Memperoleh NPWP 25

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan 26

Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Pelaporan Kegiatan Usaha 26

Penghapusan NPWP 27

Pemindahan Wajib Pajak 28

Wajib Pajak Meninggal Dunia 29

Pengukuhan dan Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak 29

Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta

Pengukuhan PKP dengan Sistem e.Registration 29

Sanksi 30

Pengertian Surat Pemberitahuan 31

Fungsi Surat Pemberitahuan 31

Bentuk, Isi, dan Keterangan dan/atau Dokumen sebagai Lampiran SPT 33

Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) 33

Isi Surat Pemberitahuan (SPT) 33

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 34

Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan 35

Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak Kriteria Tertentu 36

Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT Pajak Penghasilan 36

Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dengan

Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar 37

Lampiran Surat Pemberitahuan 37

Jenis Surat Pemberitahuan 38

Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan 38

Penyampaian SPT secara Elektronik 39

Sarana, Batas Waktu, Pembayaran atau Penyetoran Pajak 40

Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Penyetoran Pajak yang Terutang 43

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Laporan pada Hari Libur 44

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 44

Pembetulan SPT 45

Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Terkait SPT dan NPWP 47

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 48

Bab 3 Ketetapan Pajak 51

Pendahuluan 51

Surat Ketetapan Pajak 51

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 53

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	55
Surat Ketetapan Pajak Nihil	56
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	56
Bab 4 Kewajiban Pembukuan/Pencatatan, dan Pemeriksaan Pajak	57
Pendahuluan	57
Kewajiban Pembukuan	58
Kewajiban Pencatatan	59
Kerahasiaan Pembukuan dan Pencatatan serta Sanksi	59
Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah	60
Penyelenggaraan Pembukuan	61
Persyaratan Administratif Penyelenggaraan Pembukuan dengan Bahasa Asing dan Mata Uang Asing	62
Kewajiban Perpjakan	63
Konversi Satuan Mata Uang Dolar	64
Pemeriksaan Pajak	65
Beberapa Istilah dalam Pemeriksaan Pajak	65
Tujuan Pemeriksaan Pajak	67
Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak	67
Jangka Waktu Pemeriksaan	68
Standar Pemeriksaan	69
Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak	71
Kewajiban Pemeriksa Pajak	71
Kewenangan Pemeriksa Pajak	72
Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan	73
Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan	74
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	75
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain	75
Bab 5 Keberatan, Banding, dan Imbalan Bunga	77
Pendahuluan	77
Keberatan	78
Persiapan dan Saat Pengajuan Surat Keberatan	80
Pencabutan Pengajuan Keberatan	82
Pelunasan Pajak yang Masih Harus Dibayar	82
Proses Penyelesaian Keberatan	83
Keputusan Keberatan	84
Sanksi dalam Keberatan Wajib Pajak	84
Pembuktian Ketidakbenaran Ketetapan Pajak	85
Banding	86
Imbalan Bunga	87

Bab 6 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 89

Pendahuluan	89
Pejabat Penagihan Pajak	90
Juru Sita Pajak dan Tindakan Pencegahan	91
Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak	92
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	93
Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus	94
Penyitaan dan Lelang	95
Pencegahan dan Penyanderaan	95
Hak Mendahulu	95

BAGIAN III—PAJAK PENGHASILAN

Bab 7 Pajak Penghasilan 97

Pendahuluan	97
Subjek Pajak	99
<i>Pengertian Subjek Pajak</i>	99
<i>Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri</i>	100
<i>Tidak Termasuk Subjek Pajak</i>	102
Kewajiban Pajak Subjektif	103
Cara Menghitung Pajak	104
<i>Penghitungan PPh dengan Dasar Pembukuan</i>	104
<i>Penghitungan PPh dengan Dasar Pencatatan</i>	105
<i>Wajib Pajak Orang Pribadi yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Hanya Meliputi Sebagian dari Tahun Pajak</i>	107
Saat Pelunasan Pajak Penghasilan	107
Sanksi Pidana	108
Objek Pajak	109
<i>Penghasilan yang Termasuk sebagai Objek Pajak</i>	109
<i>Penghasilan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak</i>	111
Pengurangan Penghasilan (Biaya)	112
<i>Biaya yang Diperkenankan bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Deductible Expenses)</i>	113
Peraturan Pemerintah tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak	114
<i>Kompensasi Kerugian</i>	115
<i>Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan sebagai Biaya (Non-deductible Expenses)</i>	116
<i>Penyediaan Makanan dan Minuman, Imbalan Bentuk Natura serta Kenikmatan di Daerah Tertentu</i>	118
<i>Pengertian Pegawai, Pemberian Natura dan Kenikmatan</i>	118
Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan	
Dikecualikan dari Objek PPh	119
Penghasilan Tidak Kena Pajak Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan	120
Tarif Pajak	121
<i>Besarnya Tarif Pajak Penghasilan</i>	121

Pengurangan Tarif Pajak	122	
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak	123	
<i>Penghasilan Berupa Dividen</i>	125	
<i>Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi</i>	126	
Penggabungan/Pemisahan Penghasilan	126	
<i>Penggabungan Penghasilan</i>	126	
<i>Pemisahan Penghasilan</i>	127	
<i>Penghasilan Anak yang Belum Dewasa</i>	128	
Hubungan Istimewa	128	
Facilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang Usaha/Daerah Tertentu	129	
Pengaturan Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu sesuai Undang-Undang		
<i>Pajak Penghasilan</i>	131	
Facilitas Perpajakan untuk KAPET	132	
Pemberian Facilitas Pajak	132	
<i>Facilitas Perpajakan bagi Penanaman Modal di Bidang Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi</i>	133	
Perlakuan PPh atas Stock Option	133	
<i>Perlakuan PPh atas Penjualan Barang atau Pemberian Kredit dengan Facilitas Khusus yang Diberikan kepada Karyawan</i>	134	
<i>Perlakuan PPh atas Biaya Bunga dan Biaya Overhead dalam Masa Konstruksi</i>	134	
<i>Perlakuan PPh atas Selisih Kurs</i>	135	
<i>Pembebanan Kerugian Selisih Kurs Tahun 1997 bagi Wajib Pajak Merger</i>	138	
<i>Perlakuan PPh atas Sewa</i>	138	
<i>Pembagian Hasil</i>	141	
Pengakuan Penghasilan atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit		
Nonperforming	142	
<i>Tata Cara Pelaksanaan dan Permasalahannya</i>	142	
<i>Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan</i>	143	
<i>Perpajakan atas Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak</i>	144	
<i>Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran Biaya Perolehan Perangkat Lunak Komputer</i>	145	
<i>Perlakuan Pajak Penghasilan atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa</i>	146	
<i>Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	146	
Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	147	
<i>Aturan Peralihan</i>	148	
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Penyalur/Distributor Rokok	148	
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Kegiatan Usaha Berbasis Syariah	149	
Bab 8	Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan	151
Pendahuluan	151	
Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan	152	

Usaha Asuransi	158
<i>Perusahaan Asuransi Kerugian</i>	158
<i>Perusahaan Asuransi Jiwa</i>	158
Lembaga Penjamin Simpanan	159
Usaha Pertambangan	159
Usaha Kehutanan	159
Usaha Pengolahan Limbah Industri	160
Bab 9 Penilaian Harta saat Penjualan atau Pengalihan Harta dan Penilaian Persediaan	161
Harga Perolehan/Harga Penjualan	161
<i>Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Jual Beli Harta</i>	162
<i>Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Tukar-menukar Harta</i>	162
<i>Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta dalam Rangka Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha</i>	163
<i>Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta karena Hibah, Bantuan atau Sumbangan, dan Warisan</i>	165
<i>Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta Termasuk Setoran Tunai yang Diterima oleh Badan sebagai Pengganti Penyertaan Modal</i>	166
Harga Perolehan Aset Membangun Sendiri	167
Harga Perolehan Sewa	167
Penilaian Persediaan dan Pemakaian Persediaan	167
Penilaian Persediaan bagi Wajib Pajak Pedagang Valuta Asing	168
Bab 10 Penyusutan Aset Berwujud dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	171
Penyusutan	171
<i>Pengertian</i>	171
<i>Metode Penyusutan</i>	172
<i>Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan</i>	173
<i>Penghitungan Penyusutan</i>	179
Penyusutan pada Akhir Masa Manfaat	180
<i>Saat Penyusutan</i>	181
Penarikan Harta Bukan Bangunan	181
Pengelompokan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan atas Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler	182
<i>Jenis Harta yang Disusutkan dan Pengelompokannya</i>	182
<i>Tata Cara Penghitungan Penyusutan Fiskal</i>	182
Penghitungan Penyusutan atas Komputer, Printer, Scanner, dan Sejenisnya	183
Penghitungan Penyusutan atas Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan	183
Ketentuan Lain	184
Amortisasi	184
<i>Pengertian</i>	184

<i>Metode Amortisasi dan Cara Penghitungannya</i>	185
<i>Pengelompokan Aset Tetap Tidak Berwujud dan Tarif Amortisasi</i>	186
<i>Saat Amortisasi dan Amortisasi pada Akhir Masa Manfaat</i>	187
Ketentuan Lain	187
Pengalihan Hak Aset Tetap Tidak Berwujud	188
Bab 11 Penilaian Kembali Aset Tetap 191	
Pengertian	191
Tujuan Penilaian Kembali	191
Wajib Pajak yang Dapat Melakukan Penilaian Kembali	192
Aset Tetap yang Dapat Dinilai Kembali	192
Dasar Penilaian Kembali	192
Penghitungan PPh atas Selisih Penilaian Kembali	193
Permohonan Penilaian Kembali	194
Dasar Penyusutan Aset Tetap	195
Batas Waktu Pembayaran	195
Wajib Pajak Melakukan Pengalihan	195
Penyesuaian Aturan dalam Penilaian Kembali Aset Tetap	196
Tata Cara Pengajuan Permohonan	197
Aset yang Diajukan Permohonan	197
Akuntansi Penilaian Kembali Aset Tetap	197
Tarif PPh atas Penilaian Kembali Aset Tetap	198
Dasar Penyusutan dalam Hal Dilakukan Penilaian Kembali Aset Tetap	198
Pengenaan Tambahan Pajak Penghasilan	199
Bab 12 Pajak Penghasilan Pasal 21 201	
Pendahuluan	201
Ketentuan Umum	202
Pemotong Pajak	204
<i>Pengertian Pemotong Pajak</i>	204
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang Memiliki NPWP	205
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP	206
<i>Pengecualian sebagai Pemotong Pajak</i>	206
<i>Kewajiban Pemotong Pajak</i>	207
Subjek Pajak PPh Pasal 21	208
<i>Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21</i>	208
<i>Pengecualian sebagai Penerima Penghasilan</i>	209
Kredit Pajak bagi Penerima Penghasilan dan Pelaporan dalam SPT	210
Objek Pajak PPh Pasal 21	211
<i>Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	211
<i>Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21</i>	211
<i>Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final</i>	212
Dasar Pengenaan Pajak atas Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26	213
<i>Saat PPh Pasal 21 Terutang</i>	213
Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21	214

<i>Pegawai Tetap</i>	214
<i>Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas</i>	215
<i>Penerimaan Pensiun</i>	215
<i>Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, dan Uang Saku Harian</i>	216
<i>Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Kepolisian, dan Para Pensiunan</i>	216
<i>Ketentuan Khusus Pemotongan PPh Pasal 21</i>	217
<i>Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus</i>	217
<i>Objek, Tata Cara Pemotongan, dan Sifat Pemotongan</i>	218
<i>Tarif PPh Pasal 21 yang Digunakan</i>	218
<i>Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pemotongan</i>	220
<i>Ketentuan Peralihan</i>	221
<i>Pemotongan PPh Pasal 21 atas Dana Pensiun yang Dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup</i>	221
<i>Uang Lembur</i>	222
<i>Uang Rapel</i>	222
<i>Penghasilan Karyawati</i>	223
<i>Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan pada Umumnya Diberikan Sekali Saja atau Sekali Setahun</i>	224
<i>Imbalan atas Jasa atau Kegiatan yang Jumlahnya tidak Dihitung atas Dasar Banyaknya Hari yang Diperlukan untuk Menyelesaikan Jasa/Kegiatan yang Diberikan</i>	224
<i>Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Sehubungan dengan Kegiatan Multilevel Marketing</i>	225
<i>Honorarium Anggota Dewan Komisaris/Pengawas yang Tidak Merangkap Pegawai Tetap</i>	225
<i>Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, dan Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur untuk Mantan Pegawai</i>	225
<i>Penghasilan Tenaga Ahli</i>	225
<i>Penghasilan Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Pegawai yang Menarik Dana Pensiun</i>	226
<i>Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya Diperoleh dalam Mata Uang Asing</i>	226
<i>PPh Pasal 21 Seluruh/Sebagian Ditanggung oleh Pemberi Kerja</i>	226
<i>Tunjangan Pajak</i>	226
<i>Penerimaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya</i>	226
<i>Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai Selain Tenaga Ahli atas Imbalan Bersifat Berkesinambungan</i>	227
<i>Pengambilan Dana Pensiun oleh Peserta Pensiun yang Dibayarkan oleh Penyelenggara Program Pensiun</i>	227
<i>Penghitungan PPh Pasal 21</i>	227

<i>Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap</i>	228
<i>Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun yang Dibayarkan secara Berkala (Bulanan)</i>	253
<i>Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah Satuan, dan Penerima Upah Borongan</i>	257
<i>Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan sebagai Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun oleh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus sebagai Pegawai</i>	260
<i>Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai</i>	261
<i>Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan</i>	264
<i>Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai, Selain Tenaga Ahli, Sehubungan dengan Pemberian Jasa yang dalam Pemberian Jasanya Mempekerjakan Orang Lain sebagai Pegawainya dan/atau Melakukan Penyerahan Material/Bahan</i>	265
<i>Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Peserta Kegiatan</i>	266
<i>Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 26 atas Penghasilan Pegawai dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri yang Memperoleh Gaji Sebagian atau Seluruhnya dalam Mata Uang Asing</i>	266
Bab 13 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 267	
Pendahuluan	267
<i>Pagu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah</i>	267
Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21	268
Ketentuan Khusus	272
Bab 14 Pajak Penghasilan Pasal 22 273	
Pendahuluan	273
Pemungut Pajak	273
Tarif Pajak	275
Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22	276
Dikecualikan dari Pemungutan Pajak	276
<i>Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya</i>	278
Tata Cara dan Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain	280
Bab 15 Pajak Penghasilan Pasal 23 283	
Pendahuluan	283
Pemotong Pajak	283
Saat Terutangnya	284

Tarif dan Objek Pajak	284
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi	285
Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan	288
Bukan Objek Pajak	289
Penghasilan atas Jasa Keuangan	290
Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan	290
Bab 16 Pengkreditan Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)	291
Pendahuluan	291
Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri	292
Perlakuan Perpajakan dan Penentuan Sumber Penghasilan	292
Penggabungan Penghasilan	294
<i>Saat Penggabungan Penghasilan</i>	294
<i>Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri</i>	294
Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Pajak Badan	296
Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Pajak Orang Pribadi	296
Kerugian di Dalam Negeri	297
Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara	298
Kerugian di Luar Negeri	299
Penghasilan Wajib Pajak Dikenakan Pajak Bersifat Final	300
Pengurangan/Pengembalian Kredit Pajak Luar Negeri	301
Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri	301
Bab 17 Pajak Penghasilan Pasal 25	305
Pendahuluan	305
Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25	306
<i>Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Bulan-Bulan Sebelum Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan</i>	306
<i>Surat Ketetapan Pajak sebagai Dasar Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25</i>	307
<i>Angsuran PPh Pasal 25 untuk Setiap Bulan dan Sesudah Adanya Keputusan Mengenai Kelebihan Pembayaran Pajak</i>	307
Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25	308
Penghitungan PPh Pasal 25 dalam Hal-Hal Tertentu	308
<i>Wajib Pajak Berhak atas Kompensasi Kerugian</i>	308
<i>Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur</i>	310
<i>SPT Tahunan PPh Tahun Lalu Terlambat Disampaikan</i>	311
<i>Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan</i>	312
<i>Wajib Pajak Membetulkan Sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar dari Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan</i>	315
<i>Terjadi Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak</i>	316

PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa dengan Hak Opsi, BUMN, dan BUMD	317
<i>PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru</i>	317
<i>PPh Pasal 25 bagi WP Bank dan Sewa dengan Hak Opsi</i>	320
<i>PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD</i>	320
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu	321
<i>Kewajiban Orang Pribadi Pengusaha Tertentu</i>	321
Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Wajib Menyusun Laporan Keuangan Berkala	323
Pengurangan PPh Pasal 25 dalam Tahun 2009	323
Bab 18 Pajak Penghasilan Pasal 26 327	
Pendahuluan	327
Subjek Pajak PPh Pasal 26	327
Tarif, Objek Pajak, dan Sifat Pengenaannya	328
Pemotong Pajak	330
Ketentuan Pasal 26 sesuai Undang-Undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan	330
PPh Pasal 26 atas Penghasilan Penjualan atau Penghasilan Saham	331
Saat Terutangnya	332
Penyetoran dan Pelaporan Pajak	332
Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi Luar Negeri	333
PPh Pasal 26 yang Tidak Bersifat Final	334
Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing	336
Bab 19 Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu 339	
Pendahuluan	339
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	340
<i>Dasar Hukum</i>	340
<i>Objek Pajak</i>	340
<i>Pemotong Pajak</i>	341
<i>Tarif dan Sifat Pemotongan Pajak</i>	341
<i>Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berpenghasilan Rendah</i>	341
<i>Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan</i>	342
<i>Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan</i>	342
Hadiah Undian	344
<i>Dasar Hukum</i>	344
<i>Objek Pajak</i>	344
<i>Tarif Pajak</i>	344
<i>Penyelenggara Undian</i>	344
<i>Kewajiban Penyelenggara Undian</i>	344
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	345
<i>Dasar Hukum</i>	345
Pengertian dan Objek Pajak	346
<i>Tarif Pajak</i>	347

Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan PPh atas Penghasilan Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	349
<i>Dasar Penghitungan Pajak</i>	350
<i>Sifat Pengenaan Pajak</i>	350
<i>Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan</i>	351
<i>Pengalihan Hak Berdasarkan Keputusan Lelang</i>	353
<i>Ketentuan Khusus</i>	353
<i>Surat Keterangan Bebas (SKB)</i>	354
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	355
<i>Dasar Hukum</i>	355
<i>Tarif Pajak</i>	355
<i>Pembukuan Wajib Pajak</i>	356
<i>Pembayaran PPh Pasal 25</i>	356
<i>Cara Pelunasan Pajak</i>	356
<i>Kewajiban Penyewa (Pemberi Hasil)</i>	357
Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	357
<i>Dasar Hukum</i>	357
<i>Pengertian</i>	358
<i>Tarif Pajak</i>	358
<i>Pengenaan Pajak</i>	359
<i>Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan</i>	359
Jasa Konstruksi	360
<i>Pengertian dan Lingkup Jasa Konstruksi</i>	360
Pencatatan dan Kredit Pajak	362
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Usaha Jasa Konstruksi	362
Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi	364
Pengertian dan Pemotongan Pajak Penghasilan	365
Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan	365
Pihak Pemotong Pajak Penghasilan	366
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif	366
Tarif Pajak	367
Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan Koperasi	367
Objek Pajak, Besarnya Pajak Penghasilan, dan Sifat Pemotongan	367
Pemotong Pajak Penghasilan	368
Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh	
<i>Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri</i>	368
Tarif, Sifat Pengenaan, dan Tata Cara Pemotongan	369
Bab 20 Perhitungan Pajak Penghasilan pada Akhir Tahun	371
Pendahuluan	371
Kredit Pajak	371
Pajak yang Terutang Lebih Besar daripada Kredit Pajak	372
Pajak yang Terutang Lebih Kecil daripada Kredit Pajak	373
Pajak yang Terutang Nihil	374

BAGIAN IV—PENGADILAN PAJAK**Bab 21 Pengadilan Pajak 375**

<i>Kedudukan dan Tempat Sidang Pengadilan Pajak (PP)</i>	377
Susunan Pengadilan Pajak	377
Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim	379
Larangan bagi Hakim	380
Panitera	380
Kekuasaan Pengadilan Pajak	380
Pemeriksaan Sengketa Pajak	381
Kuasa Hukum	381
Banding	382
Pengajuan Banding dan Permasalahannya	382
Pencabutan Banding	383
Gugatan dan Pengajuan Gugatan	383
Pihak yang Mengajukan Gugatan	384
Pencabutan Gugatan	384
Persiapan Persidangan	385
Pelaksanaan Persidangan	385
Pemeriksaan dengan Acara Biasa	385
Pemeriksaan dengan Acara Tepat	386
Sengketa Pajak Tertentu	387
Pembuktian	387
Putusan	388
Pelaksanaan Putusan	390

Bab 22 Pengampunan Pajak 391

Pendahuluan	391
Pengertian, Sejarah, dan Perkembangan Pengampunan Pajak	393
Pertimbangan Dilakukannya Pengampunan Pajak	395
Lingkup Pemberian Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi	396
Persyaratan Wajib Pajak untuk Diberikan Penghapusan Sanksi Akibat Pembetulan SPT	399
Data dan Informasi dalam SPT Tahunan PPh	399
Pemeriksaan Pajak	400

Lampiran: Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Sertifikasi A, Sertifikasi B, dan Sertifikasi C L-1

Daftar Pustaka D-1

Indeks I-1